

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM SATU DESA SATU
DA'I PADA DEWAN DAKWAH ISLAMIAH
INDONESIA PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh:

MELISA ARDIYANI

NPM 1741030157

Jurusan : Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM SATU DESA SATU
DA'I PADA DEWAN DAKWAH ISLAMIAH
INDONESIA PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh:

MELISA ARDIYANI

NPM 1741030157

Jurusan : Manajemen Dakwah

Pembimbing I : Dr. Tontowi Jauhari, MM

Pembimbing II : Mulyadi, S.Ag., M.Sos.I

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses yang di gunakan untuk menilai seberapa baik suatu kebijakan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Hal ini juga dapat di gunakan untuk menentukan apakah proses pelaksanaan kebijakan telah di laksanakan sesuai dengan petunjuk teknik yang telah di tentukan. Kebijakan program satu desa satu da'i ialah program unggulan Dewan Dakwah Lampung yang sudah di jalankan sejak tahun 2000 sebagai upaya untuk membina umat Islam terutama didesa pedalaman dan daerah transmigrasi, sehingga perlu di lakukannya evaluasi terhadap kebijakan program satu desa satu da'i dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif, untuk mengkaji kebijakan program satu desa satu da'i setelah di lakukan evaluasi kebijakan program, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari dokumen program satu desa satu da'i, dan data sekunder bersumber dari berita atau media, perpustakaan, dokumentasi dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan terhadap tingkat keberhasilan kebijakan program satu desa satu da'i pada Dewan Dakwah Lampung dengan membandingkan antara tujuan atau target dan hasil pencapaian kebijakan program satu desa satu da'i di katakan tidak berhasil. Dari sisi pelaksanaan, evaluasi kebijakan program satu desa satu da'i baru di lakukan 3 kali selama pelaksanaannya. Dalam melihat proses pelaksanaan dengan menggunakan model evaluasi CIPP sebagai berikut: pertama, evaluasi konteks/*(context)* cukup baik, dengan menetapkan desa sebagai target atau sasaran dakwah nya, kesesuaian latar belakang dan tujuan program satu desa satu da'i, analisis kebutuhan program satu desa satu da'i. Kedua, evaluasi *Input*/(masukan) pemilihan peserta da'i sesuai dengan kriteria, adanya kepengurusan daerah yang tidak aktif ke organisasi, penggunaan sarana dan prasaran sudah cukup mendukung kegiatan program satu desa satu da'i, pengolahan dana anggaran program satu desa satu da'i yang belum baik. Ketiga, evaluasi *process*/(proses) belum bisa di katakan berhasil, ketidak sesuai an jadwal kegiatan dauroh atau pelatihan da'i, pelaksanaan rekrutmen da'i dan tahap

penyeleksian yang selektif, sehingga tidak banyak peserta kader da'i dapat mengikuti pembinaan atau pembekalan da'i di kantor provinsi. Keempat, evaluasi *product*/(produk) di katakan tidak berhasil, sesuai dengan indikator keberhasilan program, bahwa pelaksanaan kegiatan kebijakan program satu desa satu da'i belum mampu memenuhi kebutuhan sasaran dakwah nya yaitu dengan tersedianya satu da'i di setiap desa, lemahnya kepengurusan daerah dan pengelolaan dana anggaran program satu desa satu da'i yang belum stabil sehingga mengakibatkan terkendala nya keberhasilan pelaksanaan program satu desa satu da'i.

Kata kunci: *evaluasi kebijakan, program satu desa satu da'i, model evaluasi CIPP*



ABSTRACT

Policy evaluation is a process used to assess how well a policy is in achieving its goals or objectives. It can also be used to determine whether the policy implementation process has been carried out in accordance with predetermined tactical instructions. The policy of the one village one preacher program is the flagship program of the Lampung Da'wah Council which has been running since 2000 as an effort to foster Muslims, especially in remote villages and transmigration areas, so it is necessary to evaluate the policy of the one village one preacher program using CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product) at the Indonesian Islamic Da'wah Council, Lampung Province.

This study uses evaluation research with a qualitative approach, to examine the policy of the one village one da'i program after evaluating program policies, this research uses interview, observation and documentation data collection techniques. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Primary data sourced from one village one da'i program document, and secondary data sourced from news or media, libraries, documentation from the Indonesian Islamic Da'wah Council, Lampung Province.

The results showed that the policy evaluation of the success rate of the one village one da'i program policy at the Lampung Da'wah Council by comparing the goals or targets and the results of the one village one da'i program policy achievement was said to be unsuccessful. In terms of implementation, the evaluation of the policy of the one village one da'i program was only carried out 3 times during its implementation. In looking at the implementation process using the CIPP evaluation model as follows: first, the evaluation of the context / (context) is quite good, by setting the village as the target or target of its da'wah, the suitability of the background and objectives of the one village one da'i program, analyzing the needs of the program one one da'i village. Second, evaluation of the selection of da'i participants in accordance with the criteria, the existence of regional management who are not active in the organization, the use of facilities and infrastructure is sufficient to support the activities of the one village one preacher program, processing budget funds for the one village one da'i program. 'i that hasn't been good. Third, the evaluation of the process / (process) cannot be said to be successful, the schedule of cycle activities or da'i training does not match, the

implementation of da'i recruitment and selective selection stages, so that not many da'i cadre participants can take part in coaching or debriefing. da'i at the provincial office. Fourth, the evaluation of the product/(product) is said to be unsuccessful, according to the program's success indicators, that the implementation of the policy activities of the one village one da'i program has not been able to meet the needs of the da'i target, namely the availability of one da'i in each village, weak management regions and the management of budget funds for the one village one da'i program which has not been stable, resulting in problems in the successful implementation of the one village one da'i program.

Keywords: *policy evaluation, one village one preacher program, CIPP evaluation model*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melisa Ardiyani
NPM : 1741030157
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Program Satu Desa Satu Da’i pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 05 April 2022

Penulis



Melisa Ardiyani
NPM. 1741030157



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Lektol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **Evaluasi Kebijakan Program Satu Desa Satu Da'i pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung**
Nama : **Melisa Ardiyani**
NPM : **1741030157**
Jurusan : **Manajemen Dakwah**
Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Tontowi Jauhari, MM
NIP. 197009141997031002


Mulyadi, M.Sos.I
NIP. 197403261999031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah


Yunidar Cut Muja Yanti, M.Sos.I
NIP. 197010251999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Lektol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Evaluasi Kebijakan Program Satu Desa Satu Da’i pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung” disusun oleh **Melisa Ardiyani**, NPM : 1741030157, Program Studi **Manajemen Dakwah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal : **Jum’at / 08 April 2022**.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag** (.....) 

Sekretaris : **Rouf Tamim, M.Pd.I** (.....) 

Penguji I : **Dr. Hasan Mukmin, MA** (.....) 

Penguji II : **Dr. Tontowi Jauhari, MM** (.....) 

Penguji Pendamping : **Mulyadi, M.S.sos.I** (.....) 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. Abdul Syukur, M.Ag
NIP. 196511011995031001

MOTTO

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي

هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl (16) : 30)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah *subhanahu wata'ala*, skripsi sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku yang ku sayangi dan ku cintai, yaitu Bapak Arsudin dan Ibu Partini yang selalu mendo'akan dan mendukung ku dalam menempuh pendidikan ini.
2. Untuk Kakak dan teteh ku, Habib Syaifuddin Nasir dan Farida Ardiyani, keponakan kecil ku Tsabit Qolbi Ala diinik, adik ku yang tersayang Rahmat Kurniawan dan Alif Riski Ramadhan, terimakasih yang telah memberikan semangat dan do'anya.
3. Untuk sahabat ku Khoirunnisya dan Mira Sofiana, dan teman-teman ku angkatan 2017 terkhusus Manajemen Dakwah kelas D.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menjadi sarana menimba ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Melisa Ardiyani lahir di kecamatan Sukadana, Lampung Timur pada tanggal 25 Mei 1999. Anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Arsudin dan Ibu Partini. Riwayat pendidikan yang pernah penulis tempuh dari SD Negeri 2 Sukadana dan selesai pada tahun 2011, Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda dan selesai pada tahun 2014, SMA Negeri 1 Labuhan Ratu dan selesai pada tahun 2017, dan selanjutnya mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah UIN Raden Intan Lampung tahun akademik 2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Rabbani Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 05 Maret 2022



Melisa Ardiyani
NPM. 1741030157

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT. Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu memberikan kenikmatan, kemudahan dan melimpahkan hidayah, taufik dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan judul "**Evaluasi Kebijakan Program Satu Desa Satu Da'i pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung**". Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kepada para sahabat beserta seluruh pengikutnya yang Insya Allah menjadi penerus risalah Rasulullah SAW hingga akhir hayat. Aamiin.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Tontowi Jauhari, MM selaku pembimbing 1 dan Mulyadi, S.Ag.,M.Sos.I selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi pada saat proses penyelesaian skripsi ini.
4. KH. Mukhlis Sholihin selaku Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung beserta jajaran.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi pendidikan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan kebaikan yang lebih besar oleh Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua

terkhusus untuk penulis dan terutama bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangsih fikiran dalam pengembangan dunia pendidikan.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bandar Lampung, 05 Maret 2022

Melisa Ardiyani
NPM. 1741030157



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematikan Pembahasan.....	19
BAB II EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM	
A. Evaluasi	21
B. Kebijakan	29
C. Evaluasi kebijakan.....	36
D. Program	41
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung	45
1. Sejarah Singkat Dewan Dakwah Isalmiyah Indonesia.....	45

2. Letak Geografis Dewan Dakwah Isalmiyah Indonesia.....	47
3. Visi, Misi Dan Tujuan Dewan Dakwah Isalmiyah Indonesia	48
4. Motto Dewan Dakwah Isalmiyah Indonesia.....	49
5. Fungsi Dewan Dakwah Isalmiyah Indonesia.....	49
6. Lembang/Logo Dewan Dakwah Isalmiyah Indonesia.....	49
7. Struktur Dewan Dakwah Isalmiyah Indonesia.....	50
8. Tujuan Dan Program Dewan Dakwah Isalmiyah Indonesia	51
B. Kebijakan Program Satu Desa Satu Da’i	54
1. Evaluasi Konteks (<i>Context</i>).....	54
2. Evaluasi Masukan (<i>Input</i>)	60
3. Evaluasi Proses (<i>Process</i>)	62
4. Evaluasi Produk (<i>Product</i>).....	67

BAB IV EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM SATU DESA SATU DA’I PADA DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH INDONESIA PROVINSI LAMPUNG

A. Tujuan dan Hasil Pencapaian.....	82
B. Model Evaluasi CIPP.....	84
1. Evaluasi Konteks (<i>Context</i>).....	84
2. Evaluasi Masukan (<i>Input</i>)	86
3. Evaluasi Proses (<i>Process</i>)	88
4. Evaluasi Produk (<i>Product</i>).....	92

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.....	99
B. Rekomendasi	101

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1	Kegiatan Dauroh/Pelatihan Da'i	65
3.2	Daftar Peserta Da'i Dewan Dakwah Lampung Tahun 2011	69
3.3	Daftar Peserta Da'i Dewan Dakwah Lampung Tahun 2012	70
3.4	Daftar Da'i Dewan Dakwah Lampung Tahun 2020	73
3.5	Kebijakan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung tentang Program Satu Desa Satu Da'i	76
4.1	Evaluasi Kebijakan Program Satu Desa Satu Da'i pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung	96



DAFTAR GAMBAR

Gambar

3.1 Gambar Logo Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia 49



DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Judul
2. Surat Rekomendasi Penelitian
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung
4. Surat Keterangan Cek Turnitin
5. Kartu Konsultasi Skripsi
6. Gambar Dokumentasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul penelitian ini adalah: **“EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM SATU DESA SATU DA’I PADA DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH INDONESIA PROVINSI LAMPUNG”**. Di dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah-istilah penting dalam judul tersebut sebagai berikut:

Evaluasi memiliki arti yaitu penilaian¹ dalam bahasa Inggris disebut juga *Evaluation*. Evaluasi diartikan sebagai penentuan nilai (*worth*) terhadap sesuatu hal, yang meliputi aktivitas pengumpulan informasi yang digunakan untuk menentukan nilai keberhasilan suatu program, produk, prosedur, tujuan atau manfaat potensi pada desain alternatif pendekatan, untuk mempertahankan pendekatan yang khusus.² Menurut Siagian, evaluasi (penilaian) di definisikan sebagai proses yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk membandingkan hasil yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.³

Menurut Daniel L. Stufflebeam mengatakan bahwa, evaluasi adalah suatu proses penilaian yang sistematis dengan standar - standar prosedur yang telah ditetapkan untuk melihat bagaimana program maupun kebijakan dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan, kemudian dari evaluasi akan memberikan hasil dan dampak dari program dan kebijakan tersebut yang bisa digunakan pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan selanjutnya.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 310.

² Mami Hajaroh, 'Pohon Teori Evaluasi Kebijakan Dan Program (Metode, Nilai Dan Menilai, Penggunaan)', *Jurnal Fondasia*, Vol. IX (2018), 17, <https://journal.uny.ac.id/index.php/foundasia/article/view/26149>.

³ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 258.

⁴ Firyal Akbar & Widya Kurniati Mohi, *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan Di Indonesia)*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), 11.

Dari beberapa pendapat tersebut jika dilihat akan menunjukkan persamaan definisi yaitu evaluasi adalah penilaian yang dilakukan secara sadar dan sistematis dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai, untuk menghasilkan informasi dari serangkaian aksi dimasa lalu yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

Menurut Noeng muhadjir, kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁵ Sedangkan menurut James Anderson, kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.⁶ Dari kedua pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Menurut Anderson, evaluasi kebijakan adalah sebagai suatu kegiatan yang menyangkut penilaian - penilaian atau pengukuran kebijakan termasuk isi, implementasi, dan dampaknya.⁷ Menurut William Dunn, evaluasi kebijakan ialah yang berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat - manfaat hasil kebijakan.⁸ Sedangkan menurut Muhadjir Darwin merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan, evaluasi kebijakan tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impacts*), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan.⁹ Dengan kata lain, evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk melihat apakah proses

⁵ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), 15.

⁶ Solichin A. Wahab, '*Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*', (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 6.

⁷ Mulyono Yalia, 'Evaluasi Kebijakan Program Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)', *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 16 No. 2 (December 2013), p. 205-20, <https://doi.org/10.20422/jpk.v16i2.143>.

⁸ *Ibid.*, 16.

⁹ Muhadjir Darwin dan Wahyu N, *BPK: Pengantar Kebijakan Publik*, (Tidak Diterbitkan, 1997), 12.

pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan.

Kebijakan program satu desa satu da'i merupakan sebuah kebijakan program yang dijalankan oleh lembaga atau yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan yang penulis pilih untuk menjadi bahan penelitian adalah kebijakan Program Satu Desa Satu Da'i pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia tepatnya diprovinsi Lampung. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung sendiri adalah sebuah organisasi yang bergerak dibidang dakwah baik dalam bentuk lisaniiyah maupun sosial yang ber - alamatkan di Jl. Sutan Jamil No. 28, Gedung Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Indonesia.

Jadi yang dimaksud dari judul "Evaluasi Kebijakan Program Satu Desa Satu Da'i pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung" ini adalah penilaian terhadap serangkaian tindakan yang telah direncanakan dan dilaksanakan, dalam rangka melihat keberhasilan pelaksanaan kebijakan program satu desa satu da'i dengan cara membandingkan antara pencapaian dengan target yang sudah ditetapkan, akan tetapi dapat juga dengan cara melihat proses pelaksanaan dari kebijakan program satu desa satu da'i pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Dakwah tidak mengenal ruang dan waktu, perkotaan atau pedesaan, di lingkungan mana pun harus ada gerakan dakwah, karena semua manusia butuh akan dakwah.

Pada kenyataannya, masih banyak daerah-daerah yang belum tersentuh oleh dakwah, terutama daerah pedesaan. Banyak da'i aktif berdakwah diperkotaan, sementara dipedesaan diabaikan. Padahal di lingkungan pedesaan tekanan kehidupan cukup berat, ekonomi mereka lemah, hidup mengharukan dan pengenalan Islam pun sangat sederhana dan belum begitu baik. Masih ada saja masyarakat desa yang mengikuti adat istiadat yang dilakukan nenek moyang mereka, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Program satu desa satu da'i merupakan sebuah kebijakan program Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang menjadi salah satu bentuk

kepedulian terhadap masyarakat pedesaan, terutama daerah pedesaan yang masih terpencil. Untuk di provinsi Lampung program satu desa satu da'i sudah dimulai sejak tahun 2000. Upaya yang dilakukan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung dalam rangka membina umat Islam terutama di pedesaan, pedalaman dan daerah transmigrasi, sekaligus untuk membentengi umat dari berbagai pengaruh terhadap pendangkalan aqidah, pemurtadan, ghazwul fikri, dan aliran-aliran sesat ditengah masyarakat desa.

Program satu desa satu da'i masih tetap berjalan sampai saat ini, sejauh ini kebijakan program satu desa satu da'i mendapat respons baik dari berbagai daerah, terutama daerah pedesaan, dengan adanya permintaan da'i terutama dari daerah-daerah pedesaan. Namun Dewan Dakwah Lampung belum bisa memenuhi sepenuhnya permintaan tersebut. Pada saat ini, jumlah da'i yang disahkan Dewan Dakwah Lampung sejak program kebijakan ini dijalankan dan sudah disebarakan di berbagai desa berjumlah sekitar 53 orang da'i. selain da'i yang ditugaskan dipedesaan tersebut, kader da'i yang dimiliki Dewan Dakwah Provinsi Lampung bermacam-macam pola aktivitasnya, dan tingkat keterikatan nya dengan Dewan Dakwah juga sangat beragam, ada yang hanya mengisi jadwal Dewan Dakwah sementara aktifitasnya di banyak tempat, akan tetapi selama para da'i itu aktif dalam kegiatan keagamaan atau berdakwah maka predikat da'i itu bisa disematkan kepada mereka. Kehidupan para da'i itu juga berasal dari semua kalangan, ada yang berprofesi sebagai petani, pedagang, pegawai, mulai dari kalangan tua maupun muda.

Evaluasi kebijakan adalah suatu proses untuk menilai atau mengukur seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan yang dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan.¹⁰ Evaluasi kebijakan berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan serta kinerja dari kebijakan, khususnya evaluasi pada pelaksanaan kebijakan publik. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan untuk dapat memahami apa yang terjadi setelah suatu kebijakan dijalankan atau direalisasikan, sehingga dapat

¹⁰ Muhadjir Darwin, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 34.

dikaji apakah kebijakan tersebut berhasil direalisasikan atau harus dilakukan perbaikan.

Evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan dari pelaksanaan suatu kebijakan, evaluasi diperlukan untuk menilai seberapa besar kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Evaluasi kebijakan penting dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan dengan melihat seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang paling mendasar dari dilakukannya evaluasi kebijakan adalah untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja dari kebijakan, serta mencari solusi terhadap kritik atas nilai yang mendasari tujuan, target dan pelaksanaan dari kebijakan.

Tak terkecuali bagi kebijakan program satu desa satu da'i perlu untuk melakukan evaluasi kebijakan program. Dewan Dakwah Lampung menetapkan kebijakan program satu desa satu da'i menjadi program unggulan yang diharapkan dapat mencapai tujuan yang pada akhirnya bisa membina, membentengi dan mengatasi permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat desa. Program satu desa satu da'i sendiri sudah berjalan cukup lama sehingga perlu ditinjau atas tingkat keberhasilannya kebijakan program tersebut, karena dalam pelaksanaannya kebijakan program satu desa satu da'i belum menunjukkan hasil kinerja kebijakan secara maksimal, melihat jumlah wilayah desa yang ada di Lampung cukup banyak. Oleh karena itu, bila mana ingin mengetahui apakah tujuan yang dirumuskan dapat tercapai, apakah aktivitas atau kegiatan yang telah dilakukan dan berhasil mencapai sasaran, apakah sumber daya yang dimiliki sudah dapat di arahkan secara optimal untuk mencapai tujuan, apakah sarana dan prasarana sudah berfungsi dengan baik, kesemuanya itu membutuhkan proses evaluasi kebijakan untuk dapat menjawab secara tepat. Sebagaimana pentingnya penetapan atau perumusan tujuan, pentingnya aktivitas dalam suatu kegiatan, maka kedudukan evaluasi dalam proses kegiatan juga memiliki kedudukan yang sama pentingnya, karena evaluasi merupakan bagian integral dari proses kegiatan program secara keseluruhan. Karena itu, secara sederhana evaluasi akan menjadi wahana untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari keseluruhan aktivitas yang kita lakukan serta menjadi sumber

informasi yang terukur hambatan - hambatan atau kendala yang dihadapi di dalam proses pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.

Keberhasilan yang merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah kita niat kan untuk kita capai. Indikator sebuah program dikatakan berhasil adalah kesesuaian bentuk prasarana dengan rencana yang ditetapkan, kesesuaian aktor yang terlibat, memperoleh rekomendasi kebijaksanaan, serta membangun sistem *monitoring* untuk program selanjutnya. Keberhasilan sangat penting untuk dicapai oleh suatu program agar permasalahan yang ada mampu diatasi dengan baik.

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan saat ini yang berkaitan dengan masalah sosial merupakan sebuah langkah penting dalam proses analisis sebuah program atau kebijakan publik. Evaluasi membuahkn pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.

Pada penelitian sebelumnya terkait evaluasi kebijakan sudah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu, diantaranya; penelitian evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Syarifuddin Usman dan Asrul Sani Habib, tentang Evaluasi Kebijakan Satu Desa Satu Miliar Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Studi Desa Gotalano Kecamatan Morotai Selatan dan Desa Bere - Bere Kec. Morotai Utara). Penelitian ini berawal dari persoalan tidak transparansi nya pengelolaan keuangan di program tersebut sehingga membuat disharmonisasi nya hubungan antara BPD dan Kepala Desa.

Adapun penelitian evaluasi kebijakan yang dilakukan Winda Nobrilian Sari, tentang Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar pada Tingkat Sekolah Menengah Atas dikecamatan Tanjong Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir. penelitian ini berawal dari persoalan ketidakmerataan atau belum tepatnya sasaran program Indonesia pintar terhadap sasaran kebijakan program tersebut.

Sedangkan penelitian lain terkait evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Nadia Apriliani, Tuah Nur, dan Andi Mulyadi, tentang Evaluasi Kebijakan KTP Elektronik (KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Penelitian ini

berawal dari belum berjalan dengan baiknya kebijakan KTP Elektronik (KTP-EL) tersebut.

Pada latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan evaluasi kebijakan dari keberhasilan kebijakan program satu desa satu da'i dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target, dan untuk melihat proses pelaksanaannya penulis menggunakan model evaluasi CIPP yang mencakup dari segi (*Context, Input, Process, Product*) dengan dituangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Program Satu Desa Satu Da'i yang ada di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung”**.

C. Fokus dan sub - Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada evaluasi kebijakan program satu desa satu da'i pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung yang berada di Jl. Sutan Jamil No.28, Gedung Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

Sedangkan sub - fokus dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pembahasan mengenai sebagai berikut: Evaluasi kebijakan hanya pada program satu desa satu da'i saja yang ada di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung, dan seberapa besar tingkat keberhasilan kebijakan program satu desa satu da'i.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian dan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu: “Bagaimana Evaluasi Kebijakan Program Satu Desa Satu Da'i pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung?”

E. Tujuan Penelitian

Sesuai judul yang akan diteliti, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah:

“Untuk mengkaji tantang Evaluasi Kebijakan Program Satu Desa Satu Da'i pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung.”

F. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran terhadap keilmuan dan bisa menjadi bahan rujukan dalam proses perkuliahan. Khususnya bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan juga dapat menambah pemahaman bagi pembaca tentang evaluasi kebijakan program satu desa satu da'i pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan tentang evaluasi kebijakan program satu desa satu da'i, penulis dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai evaluasi kebijakan program dengan penerapan model evaluasi CIPP pada pelaksanaan suatu kebijakan program satu desa satu da'i pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung.
- b. Bagi Akademisi atau Mahasiswa: Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi dalam melakukan penelitian yang sama, namun dalam lokasi dan perspektif yang berbeda.
- c. Bagi Lembaga Terkait: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkewajiban, memperbaiki dan meningkatkan kualitas setiap kebijakan program saat ini maupun berikutnya, mendorong lembaga untuk selalu mengevaluasi kebijakan program dalam membantu menilai hasil kebijakan program satu desa satu da'i pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari penelitian yang relevan ini bertujuan untuk keaslian penelitian ini. Dari hasil penelitian ini penulis melakukan penelitian yaitu Evaluasi Kebijakan Program Satu Desa Satu Da'i pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Salman Alfarisi dengan judul penelitian Da'wah di lingkungan masyarakat pedesaan; Study Implementasi Program Da'wah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Desa Waisai Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat, dipublikasikan di Jurnal Bina Ummat, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2018. Adapun hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah implementasi program Da'wah Dewan di Desa Waisai Raja Ampat Papua Barat periode 2010 – 2011 yang mencakup da'wah *binaan* yang terdiri: Pembinaan berbasis masjid, pembinaan *muallaf*, menghidupkan atau mendirikan tempat - tempat belajar Al-Qur'an, menghidupkan atau mendirikan majelis - majelis ta'lim dan program da'wah yang bersifat insidental dapat diimplementasikan di Desa Waisai Raja Ampat. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas da'i sebagai implementer dalam melaksanakan program-program tersebut ditengah-tengah masyarakat Waisai Raja Ampat. Selain itu, program tersebut juga telah menghasilkan, baik dampak langsung, dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Adapun program pemberdayaan ekonomi masyarakat *binaan*, program da'i dating desa terang dan program da'i dating desa rindang belum dapat diimplementasikan. Karena *pertama*, pengiriman da'i Dewan Dakwah tahun 2010-2011 di Waisai merupakan periode pertama, sehingga da'i lebih memfokuskan pada program pembinaan, terutama pembinaan aqidah. *Kedua*, sebagian besar masyarakat telah memiliki pekerjaan tetap, seperti pedagang, pegawai negeri, nelayan dan petani. *Ketiga*, penerangan di Waisai telah tersedia. *Keempat*, jika dilihat dari sisi geografis, hutan disekitar Waisai masih sangat rindang, sehingga program penanaman pohon tidak efektif untuk dilakukan. *Kelima*, kurangnya kemampuan da'i untuk mengimplementasikan program pemberdayaan tersebut.¹¹

¹¹ Salman Alfarisi, “Da'wah Di Lingkungan Masyarakat Pedesaan; Study Implementasi Program Da'wah Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Di Desa Waisai Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat”, *bina ummat*, Vol. 1 (2018): 38, <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatridnatsir.vli02.24>.

Penelitian yang berjudul Efektivitas Program Da'i Siaga Bencana Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Nahdlatul Ulama, yang dilakukan oleh Agus Sulistiono Nugroho, Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017. Adapun hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah bahwa: pelaksanaan kegiatan dakwah meliputi sosialisasi, pelatihan, stimulasi dan pendampingan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat sebelum dilakukan program bersifat anomous, dan sosionomous, dan setelah dilakukan program masyarakat terdapat peningkatan pengetahuan masyarakat baik teori ataupun tingkat kesiap - siagaan masyarakat, keefektivan program terlihat pada adanya perubahan atau tindakan masyarakat dalam merespons bencana.¹²

Kuncari Isnawati dengan judul Evaluasi Kebijakan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3) di Kota Samarinda, Jurnal *Administrative Reform*, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2019. Adapun hasil yang ditemukan dari penelitian ini menunjukkan bahwa program sarjana penggerak pembangunan di pedesaan (PSP-3) di Kota Samarinda yang berada di lokasi kelurahan sungau siring, tanah merah (Kecamatan Samarinda Utara) dan kelurahan sindang sari, makroman, dan sungai kapih (Kecamatan Sambutan) belum memenuhi kriteria efektif, efisien, kecukupan, kesamaan, ketepatan.¹³

Dari sekian banyak penelitian terdahulu yang pernah dilaksanakan, dapat dipahami bahwa penelitian tentang kebijakan - kebijakan yang terkait dengan pengiriman tenaga kerja professional ke wilayah pedesaan itu sudah banyak diteliti. Namun, penelitian tentang pengiriman tenaga da'i ke wilayah - wilayah desa belum banyak dilakukan, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan ini dalam penelitiannya menggunakan metode pendekatan kualitatif, sedangkan

¹² Agus Sulistiono Nugroho, 'Efektifitas Program Da'i Siaga Bencana Lembaga Penanggulangan Bencana Dan Perubahan Iklim (LPBI) Nahdlatul Ulama' (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 75.

¹³ Kuncari Isnawati, 'Evaluasi Kebijakan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan (PSP-3) Di Kota Samarinda', *Administrative Reform*, Vol. 7 (2019), p. 34,
<http://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/3074>.

penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan metode pendekatan evaluasi. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang pelaksanaan evaluasi kebijakan dari program satu desa satu da'i yang dilakukan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia terutama pada Provinsi Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi merupakan bagian dari evaluasi dan juga merupakan bagian dari penelitian. Sebagai bagian dari evaluasi, penelitian evaluasi juga berfungsi sebagai evaluasi. Seperti dikemukakan oleh Weiss (1973) bahwa "*a specific method of evaluation is evaluation research*". Metode evaluasi yang spesifik adalah penelitian evaluasi.¹⁴ Evaluasi pada penelitian ini ditujukan untuk mengambil keputusan (*decision driven*). Penelitian dari hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan terhadap kebijakan program satu desa satu da'i yang di evaluasi pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung. Terdapat dua jenis penelitian evaluasi yaitu, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis evaluasi formatif yaitu karena evaluasi formatif ini lebih menekankan dan untuk memperbaiki objek yang diteliti, dengan cara menilai kualitas pelaksanaan program dan konteks organisasi, seperti personil, prosedur kegiatan, input dan sebagainya. Evaluasi formatif digunakan untuk mendapatkan *feedback* dari suatu aktivitas dalam bentuk proses, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas program.

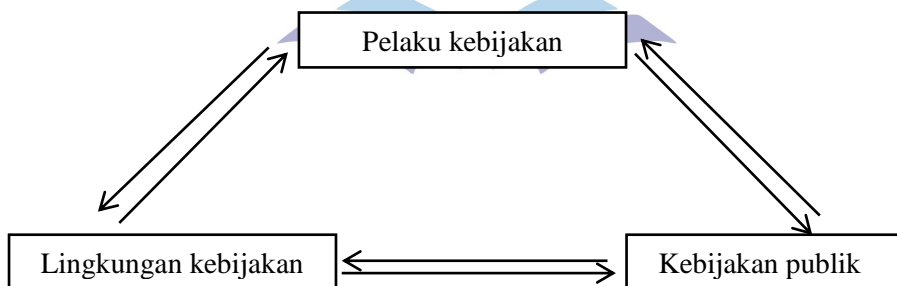
2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena data dan informasi yang peneliti

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi*, (2nd ed.) (Bandung: Alfabeta, 2019), 524.

kumpul kan lebih banyak berupa keterangan-keterangan dan penjelasan yang bukan berbentuk angka. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang sekitar dan perilaku yang diamati.¹⁵ Menurut Rahardjo dan Gudnanto adalah suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh hasil evaluasi yang diinginkan.¹⁶ Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama. Mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetil disertai dokumen atau catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan - catatan.

Menurut Samodra Wibawa, kebijakan sebagai suatu sistem yang memiliki tiga buah komponen yang berinteraksi secara timbal balik. Tiga komponen tersebut yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan itu sendiri. Ketiga komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain. Berikut merupakan ilustrasi elemen atau komponen kebijakan publik digambarkan di bawah ini:



Sumber: William N. Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press

¹⁵ J. Lexi and M M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasim, Remaja Ros (Bandung, 2010), 3. available at <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en> .

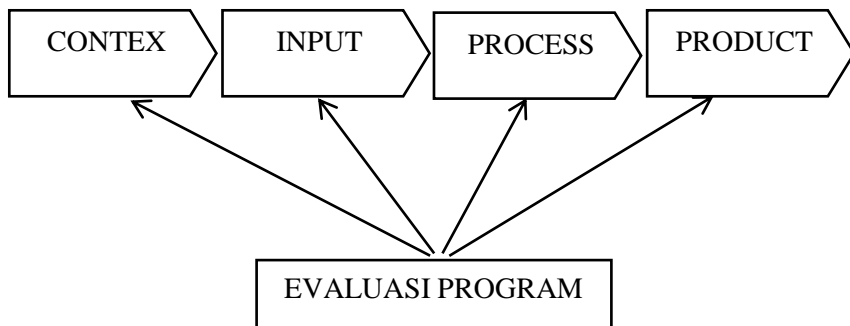
¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, ed. Revisi VII, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 45.

Komponen - komponen itu dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

- a. Pelaku kebijakan, yakni badan pemerintahan maupun orang atau lembaga non - pemerintahan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Mereka dapat mempengaruhi dan sekaligus terkena pengaruh dari suatu kebijakan. Adapun pelaku kebijakan dalam penelitian ini adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung.
 - b. Lingkungan kebijakan, yang dimaksud dengan lingkungan bukannya orang-orang atau lembaga yang berada di sekitar dan mempengaruhi pemerintah selaku penentu akhir suatu kebijakan (mereka ini semua termasuk dalam kontak pelaku/aktor kebijakan) melainkan lebih menunjuk kepada bidang - bidang kehidupan masyarakat yang dapat atau perlu dipengaruhi oleh pelaku kebijakan. Lingkungan kebijakan dalam penelitian ini adalah merujuk pada masyarakat atau desa-desa.
 - c. Kebijakan publik, yaitu serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan (atau memecahkan masalah) kehidupan masyarakat. Sedangkan kebijakan publik dalam penelitian ini adalah kebijakan program satu desa satu da'i tersebut.
3. Model Evaluasi

Bila kebijakan dapat diartikan sebagai suatu program, maka penelitian evaluasi sama dengan evaluasi program, yang dapat menggunakan model evaluasi program dari Stufflebeam. Adapun model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam ini adalah model evaluasi program CIPP (*Context, Input, Proses and Product*). Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, manajemen, perusahaan dan sebagainya. Evaluasi model CIPP berorientasi pada suatu keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*). Tujuannya adalah untuk membantu administrator (pimpinan dan staff) didalam membuat keputusan. "Evaluasi diartikan sebagai suatu untuk

mendeskripsikan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan”.



Sumber: Sugiyono, *Lingkup Evaluasi Program*, hal.536

Dengan demikian, model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah model penelitian CIPP *Evaluation Model* yang dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk pada tahun 1967 di *Ohio State University*. CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari

Context evaluation : evaluasi terhadap konteks

Input evaluation : evaluasi terhadap masukan

Process evaluation : evaluasi terhadap proses

Product evaluation : evaluasi terhadap hasil.

Keempat kata yang disebutkan diatas merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain merupakan komponen dari proses sebuah program kegiatan termasuk dalam program satu desa satu da'i. model CIPP juga merupakan model evaluasi yang memandang program yang di evaluasi sebagai sebuah sistem. Oleh karena itu, jika peneliti sudah menentukan model CIPP sebagai model yang akan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan program satu desa satu da'i maka harus dan mau tak mau peneliti menganalisis kebijakan program satu desa satu da'i tersebut berdasarkan komponen - komponennya.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan valid atau tidaknya suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian

adalah dari mana subjek dapat diperoleh.¹⁷ Sumber data dalam penelitian kualitatif dinamakan sebagai narasumber atau partisipan dalam penelitian. Sample dalam penelitian kualitatif bukan disebut sample statistik, tetapi sample teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah menghasilkan teori.¹⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Dokumen atau arsip Program Satu Desa Satu Da'i melalui wawancara mendalam dan yang didapat melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti. Menurut Sugiyono, data primer merupakan data yang bersumber langsung dari pemberi data.¹⁹ Dalam hal ini yang menjadi sumber data utama adalah pimpinan dan para staff yang bertanggung jawab langsung terkait pelaksanaan kebijakan program satu desa satu da'i yang ada di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber tidak langsung dari pemberi data atau data yang telah dipublikasikan secara resmi yang didapat dari berita media, dokumentasi dan arsip lembaga terkait lainnya.²⁰

5. Instrument Pengumpulan Data

Data merupakan bahan mentah yang dikumpulkan oleh peneliti dari lokasi penelitian. Data yang merupakan bahan spesifik dalam melakukan analisis.²¹ Dalam menjawab tujuan penelitian, maka data akan dikumpulkan dengan beberapa instrument atau alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini,

¹⁷ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2017), 3.

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, CV Alfabeta*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 298.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta (Bandung, 2014), 233.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2010), 128.

instrument pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.²²

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan. Sistematika wawancara berlandaskan pada tujuan peneliti.²³ Definisi lain yang dimaksudkan dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sampai bertatap muka antara interview dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interviewguide* (panduan wawancara).

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu jenis wawancara mengkombinasikan antara pertanyaan yang telah disiapkan secara dengan pertanyaan yang diajukan secara tiba-tiba pada saat berlangsungnya wawancara.²⁴ Dimana sebelum penulis mengadakan wawancara, penulis telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Dewan Dakwah untuk memperoleh data tentang Evaluasi Kebijakan program satu desa satu da'i.

b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat sistematika gejala-gejala yang diselidiki.²⁵ Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu

²² *Ibid.*

²³ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989),

4.

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Semarang, PT. Bumi Aksara, 2013), 83.

²⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, 44.

berkomunikasi dengan orang, tetapi observasi tidak terbatas pada orang namun juga objek-objek yang lain.²⁶

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *observation participant* dan *observation non participant*.

1) *Observation Participant*

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

2) *Observation Non Participant*

Dalam observasi non-partisipan peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data peneliti dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam observasi nonpartisipan ini, tidak akan mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang objek yang diamati tersebut.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan *Observation Non Participant* karena peneliti tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari objek yang diamati dan peneliti hanya sebagai pengamat independen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bias berupa tulisan, gambar atau karya. Dokumentasi merupakan alat pengumpul data yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan sebagainya.²⁷

²⁶ *Ibid.*, 145.

²⁷ *Ibid.*, 329.

Dokumentasi merupakan sumber non manusia, sumber ini merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai cerminan situasi/kondisi yang sebenarnya.

Tujuan menggunakan metode ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang sejarah berdirinya Dewan Dakwah Lampung, struktur organisasi, pembagian tugas, program dan lain-lain termasuk foto-foto kegiatan pengorganisasian, tentunya yang berhubungan dengan program satu desa satu da'i.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah data berakhir. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara induktif yaitu analisa diawali dengan melakukan wawancara, pembahasan, bukti pendukung, dan diakhiri dengan simpulan. Agar validasi tetap terjaga dalam teknik penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi. Triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber informasi yang menjadi objek penelitian.²⁸ Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiono, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.²⁹

- a. Mereduks Data (*Data Reduction*) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

²⁸ W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Indeks, 2013), 187.

²⁹ Sugiono, *Metodology Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 183.

- b. Penyajian Data (*Data Display*) yaitu langkah ini dilakukan untuk mengorganisir data secara sistematis sehingga membentuk suatu komponen data yang utuh dan terpadu. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*) yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung. Akan tetapi apabila kesimpulan tersebut telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka berarti kesimpulan tersebut telah kredibel.

Langkah ini dilakukan untuk verifikasi terhadap data yang diperoleh guna mencari makna, mencatat keteraturan pola, hubungan sebab akibat yang mungkin dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan yang sangat longgar tetap terbuka, dan menarik kesimpulan secara final.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan mengenai gambaran umum skripsi ini, maka penulis perlu mengembangkan sistematika penulisan skripsi. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terperinci menjadi sub - sub bab yang sistematis dan saling berkaitan dengan bab satu dengan bab yang lainnya, yaitu:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan skripsi yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub - fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab yang berisi landasan teori tentang deskripsi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian yang meliputi pengertian evaluasi, tujuan

evaluasi, macam evaluasi, model evaluasi, pengertian kebijakan, bentuk-bentuk kebijakan, tahap - tahap kebijakan, kebijakan yang baik, pengertian evaluasi kebijakan, fungsi dan tujuan evaluasi kebijakan, pengertian program, tujuan program.

BAB III merupakan penjelasan tentang deskripsi objek penelitian yang mencakup tentang gambaran umum objek, penyajian fakta dan data penelitian di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung yang meliputi sejarah berdirinya Dewan Dakwah, visi, misi dan tujuan Dewan Dakwah, motto Dewan Dakwah, fungsi Dewan Dakwah, lambang/logo Dewan Dakwah, struktur Dewan Dakwah, tugas dan program Dewan Dakwah, kebijakan program satu desa satu da'i, penerapannya empat model dalam model evaluasi CIPP, evaluasi konteks (*context*), evaluasi masukan (*input*), evaluasi proses (*process*), evaluasi produk (*product*).

BAB IV membahas tentang analisis penelitian yang mencakup analisis data penelitian yang termasuk di dalam evaluasi kebijakan dan model evaluasi CIPP serta temuan penelitian, yaitu tentang Evaluasi Kebijakan Program Satu Desa Satu Da'i pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung.

BAB V merupakan berisikan penutup tentang kesimpulan dari hasil yang diperoleh berdasarkan teori dan konsep serta hasil yang didapatkan di lapangan. Rekomendasi terkait tentang hasil penelitian agar dipertimbangkan mengenai masukan dari penulis, baik bagi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung, maupun penulis yang lain atau kalangan umum sekalipun. Serta pada akhirnya terdapat daftar rujukan dan lampiran - lampiran terkait dengan penelitian.

BAB II EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM

A. Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris “*evaluation*” yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi adalah suatu kegiatan sistematis dan terencana untuk mengukur, menilai dan klasifikasi pelaksanaan dan keberhasilan program.¹ Makna kata - kata yang terkandung didalam definisi tersebut pun menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, efektivitas menggunakan strategi, dan dapat di pertanggungjawab kan yang digunakan dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian evaluasi dapat diartikan sebagai segala upaya sistematis untuk memahami kemampuan dan kemajuan baik, sebelum, selama, maupun setelah proses kegiatan, melalui pengumpulan data, serta membandingkan nya dengan kriteria tertentu agar mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Evaluasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengendalian (evaluasi). Dari tiga fungsi manajemen (*perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan*), masih dapat memungkinkan terjadinya suatu kesalahan dalam organisasi atau lembaga. Untuk itu diperlukan fungsi pengendalian (evaluasi) yang dapat mendorong terealisasi nya tujuan yang diharapkan. Menurut James A. F. Stoner dan R. Edward Freeman, bahwa definisi dari pengendalian (evaluasi) adalah sebuah proses untuk memastikan, bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan.² Setelah dilakukan pengendalian semua aktivitas, maka aspek penting lain yang harus diperhatikan dalam mengelola

¹ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 1.

² M.Munir, Wahyu Ilham, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 67.

organisasi atau lembaga adalah dengan melakukan langkah evaluasi.

Menurut William Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata - kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.³ Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan/kontribusi pada tujuan sasaran.

Menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi - informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.⁴

Evaluasi adalah kegiatan untuk membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditentukan.⁵ Adapun perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan, apa pun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan - tindakan di masa depan (untuk masa depan). Menurut Hasibuan, rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam

³ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2003), 608.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 1.

⁵ *Ibid*, 2.

pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya yang tersedia. Selain itu juga penilaian/evaluasi merupakan alat penting untuk membantu pengambilan keputusan sejak tingkat perumusan kebijakan maupun pada tingkat pelaksanaan kebijakan program. Evaluasi dilaksanakan karena adanya dorongan atau keinginan untuk mengukur pencapaian hasil kerja atau kegiatan pelaksanaan kebijakan program terhadap tujuan yang telah ditetapkan.⁶ Evaluasi dimaksudkan untuk menetapkan relevan informasi guna pengambilan keputusan. Pemecahan masalah (*Problem Solving*), yang merupakan suatu tindakan pengambilan keputusan untuk memutuskan permasalahan. Rumusan permasalahan harus mempertimbangkan dua sisi positif dan negatif atau kelebihan dan kekurangan sebagai landasan atau pedoman dalam pengambilan keputusan yang terbaik. Menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu permasalahan dengan mengumpulkan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan suatu tindakan yang paling tepat. Pengertian ini mengandung makna bahwa suatu permasalahan dilakukan penelusuran terlebih dahulu sehingga diketahui dengan jelas pokok - pokok permasalahan atau bukan suatu permasalahan yang perlu dilakukan putusan atau pilihan.

Jika definisi diatas disimak dengan teliti akan terlihat bahwa:

- a. Orientasi waktu penilaian (evaluasi) adalah masa depan dalam arti bahwa hasil penelitian akan sangat bermanfaat untuk masa depan organisasi atau lembaga;
- b. Tujuan penilaian (evaluasi) bukan hanya keterkaitannya dengan rencana melainkan seluruh faktor - faktor organisasional yang kritikal sifatnya;

⁶ A Supriyanto, S dan Damayanti, *Perencanaan Dan Evaluasi*, (Surabaya: Airlangga University, 2007), 209.

- c. Berbeda dengan perencanaan, sifat penilaian (evaluasi) adalah korektif dan proaktif.

Penilaian atau evaluasi menjadi sangat penting mendapat perhatian karena dari evaluasi itu ada tiga hal yang dapat terlihat yaitu tujuan terlampaui, hasil yang diperoleh sama dengan tujuan yang telah ditetapkan atau tujuan tidak tercapai. Masing - masing hal tersebut menjadi hal yang sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan.

2. Tujuan Evaluasi

Tujuan diadakannya evaluasi suatu kebijakan program biasanya bervariasi, tergantung dari pihak yang memerlukan informasi hasil tersebut. Menurut Arikunto, terdapat dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih di fokuskan pada masing - masing komponen.⁷ Walaupun demikian pada dasarnya evaluasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan pelaksanaan program dan perencanaan program yang akan datang. Hasil evaluasi akan memberikan pengalaman mengenai hambatan atau pelaksanaan kebijakan program yang lalu selanjutnya dapat dipergunakan untuk memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan program yang akan datang.
- b. Sebagai alat untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya dan manajemen (resources) saat ini serta dimasa - masa mendatang, tanpa adanya evaluasi akan terjadi pemborosan penggunaan sumber dana dan daya yang sebenarnya dapat diadakan penghematan serta penggunaan untuk program - program lain.
- c. Memperbaiki pelaksanaan dan perencanaan kembali suatu kebijakan program. Sehubungan dengan ini perlu adanya kegiatan-kegiatan antara lain: mengecek relevansi dari program dalam hal perubahan-perubahan kecil yang terus menerus, mengikuti kemajuan terhadap target yang direncanakan, menentukan sebab dan faktor dalam

⁷ *Ibid*, 21.

maupun di luar yang mempengaruhi pelaksanaan program.⁸

Husein Kosasih mengemukakan bahwa evaluasi bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program kebijakan/kegiatan di masa yang akan datang.⁹

Sedangkan William N. Dunn menyebutkan bahwa evaluasi bertujuan: 1). memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, 2). memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, 3). memberi sumbangan pada aplikasi metode - metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.¹⁰

3. Macam Evaluasi

Secara umum evaluasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu evaluasi *formative* dan evaluasi *summative*, yaitu:

- a. Evaluasi *Formative*: evaluasi yang dilakukan pada tahap pelaksanaan program dengan tujuan untuk mengubah atau memperbaiki program. Evaluasi ini dilakukan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan dan didasarkan atas kegiatan sehari-hari, minggu, bulan bahkan tahun atau waktu *relative* pendek. Manfaat evaluasi formatif terutama untuk memberikan umpan balik kepada manajer program tentang kemajuan hasil yang dicapai beserta hambatan - hambatan yang dihadapi. Evaluasi *formative* sering disebut evaluasi proses atau *monitoring*.

⁸ *Ibid.*

⁹ Husein Kosasih, *Teknik Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Satuan Organisasi/Kerja Di Lingkungan Departemen Agama, Modul Diklat AKIP/LAKIP*, (Jakarta: Bafan Litbang dan Diklat Keagamaan Pusdiklat Administrasi, Departemen Agama RI, 2004), 3.

¹⁰ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 2 ed*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 609.

Evaluasi formatif \longleftrightarrow saat pelaksanaan program.

- b. Evaluasi *Summative*: evaluasi yang digunakan untuk melihat hasil keseluruhan dari suatu program yang telah selesai dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan pada akhir kegiatan atau beberapa kurun waktu setelah program, guna menilai keberhasilan program. Hasil evaluasi dapat memberikan jawaban atas pertanyaan: apakah tujuan program dapat tercapai atau tidak dan alasan - alasan mengapa demikian. Karena itu *output* program berupa *outcome* dan dampak sangat diperlukan.

Evaluasi Summatif \longleftrightarrow Setelah Program/Tahun Anggaran Selesai.¹¹

Dalam penelitian ini mengenai kebijakan program satu desa satu da'i, peneliti menggunakan evaluasi *formative* untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan program yang didasarkan pada kegiatan program sehari-hari, mingguan, bulan, bahkan tahunan atau waktu relatif pendek. Maksud dan tujuan peneliti menggunakan evaluasi formatif karena program satu desa satu da'i masih berjalan dan selain itu juga untuk memberikan balikan atau proses kebijakan program yang telah berjalan untuk dapat mengetahui hasil yang didapat sehingga kebijakan program tersebut dapat diperbaiki ke depannya.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi mengisyaratkan adanya kriteria yang digunakan untuk menentukan nilai (*worth*) dan adanya objek yang dinilai untuk mengetahui sejauhmana tujuan yang didapat dalam rangka pengambilan keputusan.

4. Model Evaluasi

Model - model evaluasi yang satu dengan yang lainnya memang tampak bervariasi, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang di

¹¹ Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: ALFABETA, 2015), 261.

evaluasi. Selanjutnya informasi yang terkumpul dapat diberikan kepada pengambil keputusan agar dapat dengan tepat menentukan tindak lanjut tentang program yang sudah di evaluasi. Ada banyak model evaluasi, tetapi dalam penulisan ini hanya akan dibicarakan beberapa model yang populer dan banyak dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja pelaksanaan evaluasi program.

Kaufman dan Thomas membedakan Klasifikasi model evaluasi menjadi delapan, yaitu:

- a. *Goal Oriented Evaluation Model*, dikembangkan oleh Tyler.
- b. *Goal Free Evaluation Model*, dikembangkan oleh Scriven.
- c. *Formative Sumative Evaluation Model*, dikembangkan oleh Scriven.
- d. *Countenance Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.
- e. *Responsive Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.
- f. *CSE-UCLA Evaluation Model*, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan.
- g. CIPP Evaluasi Model, dikembangkan oleh *Stufflebeam*.
- h. *Discrepancy Model*, dikembangkan oleh *Provus*.

Pemilihan model evaluasi akan digunakan tergantung pada tujuan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan program satu desa satu da’i digunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang dilaksanakan dalam mencakup seluruh proses program yang dilaksanakan.

Adapun model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh *Stufflebeam* yaitu model evaluasi CIPP (*konteks, input, proses, produk*).

5. Evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process And Product*)

Model CIPP (*Context, Input, Proses and Product*) pertama kali ditawarkan oleh *Stufflebeam* pada tahun 1965 sebagai hasil usahanya mengevaluasi ESEA (*The Elementary and Secondary Education Act*). Konsep tersebut ditawarkan oleh *Stufflebeam* dengan pandangan bahwa tujuan penting

evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk memperbaiki. Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, manajemen, perusahaan dan sebagainya. Evaluasi model CIPP berorientasi pada suatu keputusan (adecisionoriented evaluationapproachstructured). Tujuannya adalah untuk membantu administrator (kepala sekolah dan pendidik) didalam membuat keputusan. “Evaluasi diartikan sebagai suatu proses mendeskripsikan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna uuntuk menilai alternatif keputusan”.¹²

Sesuai dengan nama modelnya, model ini membagi menjad empat jenis kegiatan evaluasi, yaitu:

a. Evaluasi *Context* (Konteks)

Evaluasi konteks merupakan penggambaran dan spesifikasi tentang lingkungan program, kebutuhan yang belum dipenuhi, serta tujuan program. Evaluasi konteks membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program.

Evaluasi konteks dalam penelitian ini untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, tujuan program dan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kebijakan program. Dalam penelitian ini, evaluasi konteks diarahkan pada gambaran dirumuskan nya kegiatan dari kebijakan program satu desa satu da'i Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung.

b. Evaluasi *Input* (Masukan)

Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternative apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

Evaluasi input pada penelitian ini ditujukan pada sumber daya sumber daya dan sarana dan prasarana yang

¹² Mulyatiningsih Endang, *Evaluasi Program*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 126.

mendukung terselenggaranya kegiatan program satu desa satu da'i pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung.

c. Evaluasi *Process* (Proses)

Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi.

Evaluasi proses pada penelitian ini diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai rencana. Dalam penelitian ini, evaluasi proses berfokus pada proses pelaksanaan program kegiatan koordinasi pembekalan da'i. dauroh atau pelatihan dan kegiatan up grading.

d. Evaluasi Produk

Evaluasi produk merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Data yang dihasilkan akan menentukan apakah program diteruskan, diperbaiki atau dihentikan. Evaluasi produk diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada evaluasi masukan.

Evaluasi produk pada penelitian ini diarahkan pada hal - hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan, dalam hal ini hasil meliputi: hasil kegiatan, hasil penganggaran dana program dan berkelanjutan program satu desa satu da'i pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung.

B. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor, seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak

penjelasan dengan batasan - batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Noeng Muhadjir, kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas dasar keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni;

- a. tingkat hidup masyarakat meningkat,
- b. terjadi keadilan: *By the law, sosial justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual,
- c. diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah. Perencanaan, keputusan dan implementasi), dan
- d. terjaminnya pengembangan berkelanjutan.¹³

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip Syafaruddin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu "*polis*" yang artinya kota (*city*).¹⁴ Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan pemerintah atau lembaga yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu

¹³ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), 15.

¹⁴ Heinz Wehrich and Harold Koontz, *Manajemen A. Global Perspective Tent Edition*, (New York: McGraw-Hil, 1993), 123.

program, kepemimpinan dan cara bertindak, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

Kebijakan merupakan suatu istilah yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan, definisi yang diberikan cukup beragam, dan dapat dipandang, baik secara luas maupun secara sempit, bergantung pihak yang berkepentingan terhadapnya. Kebijakan yang dihasilkan/direncanakan bertujuan untuk memberikan efek perbaikan terhadap masalah-masalah sosial dan ekonomi. Kebijakan yang dihasilkan/direncanakan merupakan produk kesepakatan antara *legislative* dengan eksekutif. Hofferbert memberi pengertian kebijakan sebagai hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik. Lebih jauh, Hofferbert menawarkan dua buah cara untuk memahami suatu kebijakan. Pertama, mendekati suatu kebijakan melalui substansi nya (yaitu rumusan - rumusan redaksi suatu kebijakan yang berisi tujuan - tujuan 'goals' apa yang hendak dicapai); Kedua, dari proses pelaksanaannya yang membeberkan kepada kita hasil maupun dampak dari kebijakan tersebut, baik hasil yang masih bersifat sementara maupun yang sudah final.¹⁵

Hofferbert menyoroti kebijakan menjadi "hasil-hasil keputusan", "pelaku", dan "tujuan-tujuan publik". Pelaku yang dimaksud adalah *legislative*, eksekutif dan siapa pun yang hasil keputusannya untuk kepentingan orang banyak/masyarakat. Selanjutnya, pengertian yang dikemukakan oleh Hofferbert ini juga menekankan memahami kebijakan dari sisi substansi dan proses pelaksanaan kebijakan. Substansi kebijakan yaitu rumusan-rumusan

¹⁵ Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 49.

kebijakan yang telah diputuskan dan tujuan-tujuan yang akan dicapai.¹⁶

2. Bentuk-Bentuk Kebijakan

Kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Kebijakan Publik Makro

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah.

Dalam pengimplementasiannya, kebijakan publik makro dapat langsung di implementasikan.

b. Kebijakan Publik *Meso*

Kebijakan publik yang bersifat *meso* atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjelasan pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa:

- 1) Peraturan Menteri
- 2) Surat Edaran Menteri
- 3) Peraturan Gubernur
- 4) Peraturan Bupati
- 5) Peraturan Wali Kota
- 6) Keputusan Bersama atau SKB antar - Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota.

c. Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang diatasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat - aparat publik tertentu yang

¹⁶ *Ibid*, 50.

berada dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.¹⁷

3. Tahap - tahap Kebijakan Publik

Menurut Charles Lindblom, mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan.¹⁸ Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses - proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap - tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Tahap Penyusunan Agenda

Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah-masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi lebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan - alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai

¹⁷ Hesel Nogi Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003), 2.

¹⁸ Budi Winarni, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), 32.

¹⁹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), 22.

alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut di adopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan - catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus di implementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan - badan pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan - badan pemerintah yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementor*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

Oleh karena itu, di tentukanlah ukuran - ukuran atau kriteria - kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Dilihat dari uraian diatas mengenai tahapan pembuatan kebijakan publik, maka dapat dimengerti bahwa evaluasi kebijakan memegang peranan penting dalam tahapan kebijakan. Mengingat banyaknya masalah-masalah yang ada dalam masyarakat tentunya juga membutuhkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai untuk kondisi masyarakat yang ada.

4. Kebijakan yang Baik

Dari berbagai referensi yang dikaji, dapat dikemukakan bahwa kebijakan yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Dibuat secara ilmiah, yaitu suatu kebijakan dibuat secara rasional dan berdasarkan data yang lengkap, akurat dan *up - to - date*. Oleh karena itu dalam membuat kebijakan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan kebijakan atau dengan kata lain memperhatikan faktor - faktor eksternal.
- b. Kebijakan yang dibuat, harus terbuka terhadap ide dan solusi yang baru (inovatif, kreatif dan fleksibel).
- c. Tujuan kebijakan adalah untuk memecahkan masalah,antisipasi masalah, membawa kemajuan organisasi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Kebijakan harus adil. Kebijakan dibuat tidak hanya untuk kelompok tertentu saja, tetapi untuk keseluruhan warga organisasi atau masyarakat dalam suatu Negara.
- e. Kebijakan dirumuskan dengan kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran.
- f. Kebijakan dibuat untuk waktu yang relatif lama, sehingga tidak sering ganti kebijakan yang akan membingungkan masyarakat.
- g. Kebijakan harus selalu memperhitungkan dampak kebijakan terhadap semua pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung (*inclusive*).

- h. Kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara mudah dengan didukung sumber daya manusia dan sumber daya lain yang memadai.
- i. Sebelum kebijakan diputuskan untuk diberlakukan, maka perlu di uji coba terlebih dahulu, sehingga akan dapat diketahui kelemahan dalam pemahaman dan pelaksanaan. Dengan demikian kebijakan yang akan di implementasikan telah teruji efektivitas dan efesiansinya.
- j. Kebijakan yang telah diputuskan harus konsiten dilaksanakan. Kebijakan harus dibuat secara rasional, hati - hati dan teliti, sehingga setelah di putuskan tidak dirubah lagi dan harus dilaksanakan.
- k. Kebijakan yang telah diimplementasikan harus dimonitor pelaksanaannya dan diukur hasil dan *outcome* nya.
- l. Kebijakan harus dapat merubah perilaku positif orang - orang yang di kenai kebijakan tersebut.
- m. Belajar dari pengalaman kebijakan yang berhasil dan gagal (*learns lessons*).²⁰

C. Evaluasi Kebijakan

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, kebijakan harus di awasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “Evaluasi Kebijakan”.²¹ Evaluasi kebijakan ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan guna di pertanggungjawab kan kepada konsistuesin nya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalah - nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya analisis nilai dari

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi*, (2nd ed.) (Bandung: Alfabeta, 2019), 6.

²¹ Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003), 176.

fakta-fakta kebijakan. Jika monitoring merupakan prosedur analitis untuk menghasilkan informasi objektif tentang sebab dan akibat kebijakan program, maka evaluasi merupakan produksi informasi tentang nilai atau harga keluaran (*output*) kebijakan.²²

Evaluasi kebijakan publik menurut Muhadjir, merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.²³ Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impacts*), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan. Dengan kata lain, evaluasi dapat digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan.

Menurut Anderson, evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan program. Menurut William Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup: kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi kebijakan, menurut Agustino ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek *instrument* (cara

²² *Ibid*, 339.

²³ *Ibid*, 112.

pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan *instrument* tersebut;

- b. Evaluasi kebijakan berusaha menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dengan asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dapat dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah publik, maka evaluasi harus menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan kebijakan tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang seringkali terjadi dalam praktiknya adalah tujuan telah tercapai, tetapi masalah tidak terselesaikan;
- c. Evaluasi kebijakan juga perlu untuk memberikan sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.²⁴

Selanjutnya untuk melakukan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan, menurut Widodo terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program, kegiatan;
- b. Penjabaran tujuan kebijakan, program, dan kegiatan ke dalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan;
- c. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program;
- d. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program tadi, dicarikan data di lapangan;
- e. Hasil data yang diperoleh dari lapangan kemudian dilakukan pengolahan, dan dikomparasi dengan kriteria pencapaian tujuan.²⁵

²⁴ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 186.

²⁵ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bayumedia, 2008), 125.

2. Fungsi dan Tujuan Evaluasi Kebijakan

Sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan, evaluasi memiliki fungsi dan tujuan. Menurut William Dunn, evaluasi kebijakan memiliki tiga fungsi yaitu:

- a. Evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan tepercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi: (1) seberapa jauh kebutuhan, nilai, kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan atau program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai; (2) apabila tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak asasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan agar jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar perikehidupan warga; dan terakhir, (3) bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan pada suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini diperlukan oleh publik ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan *right to know* bagi warga masyarakat;
- b. Evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pemilihan nilai dalam mencapai tujuan dan target, sejatinya tidak didasari kepentingan - kepentingan nilai dari kelompok/golongan/partai tertentu. Ia harus didasari atas nilai yang memang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Karena itu, nilai perlu dijelaskan dengan

mengidentifikasi dan mengoperasikan tujuan - tujuan dari target - target yang hendak dicapai. Nilai-nilai yang mendasari pengambilan keputusan oleh para decision maker perlu dikritik dengan menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis kebijakan dapat menguji alternatif nilai yang pernah diperhitungkan maupun landasan – landasan para decision maker dalam berbagai bentuk rasionalitas.

- c. Evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan. Informasi tidak memdainya kinerja kebijakan yang dihasilkan dari proses evaluasi kebijakan dapat memberi sumbangan bagi reformulasi masalah kebijakan dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu diredefinisi ulang. Evaluasi kebijakan pun dapat berfungsi dalam menyumbangkan alternative kebijakan yang lebih baru atau revisi atas kebijakan-kebijakan public dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang ada sebetulnya perlu diganti dengan yang lebih baik.²⁶

Beberapa ahli juga mengungkapkan tentang tujuan-tujuan dari evaluasi, subarsono merinci beberapa tujuan dari evaluasi antara lain sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui derajat berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Saah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.

²⁶ *Ibid*, 609-611.

- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

D. Program

Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan *alternative* yang tepat dalam mengambil keputusan. Evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan.²⁷

Evaluasi program merupakan *instrument* atau alat *indicator* untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan kegiatan program secara keseluruhan. Evaluasi bukan hanya menilai suatu aktivitas secara spontan dan incidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Makna dari evaluasi program itu yaitu mengalami proses pematapan. Definisi yang terkenal untuk evaluasi dikemukakan oleh Ralph Tyler, yang mengatakan bahwa evaluasi program adalah proses untuk

²⁷ Suharmi Arikunto Dan Cipi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*, Bumi Aksar (Jakarta, 2010), 1.

mengetahui apakah tujuan program sudah terealisasikan. Menurut Stufflebeam dan Cornbach, mengemukakan bahwa evaluasi program merupakan upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada yang mengambil keputusan. Sehubungan dengan definisi tersebut *The Standford Evaluation Consortium Group* menegaskan bahwa meskipun evaluator menyediakan informasi, evaluator bukanlah pengambil keputusan tentang suatu program.²⁸

Evaluasi program pada prinsipnya mengandung tiga aspek, yaitu deskripsi, kriteria dan pertimbangan program. Deskripsi program merupakan gambaran yang menyeluruh dan lengkap tentang suatu program, kriteria adalah batasan atau ukuran yang digunakan dalam evaluasi, dan pertimbangan adalah suatu proses pembentukan keputusan. Tercapainya tujuan program merupakan *indicator* utama keberhasilan program tersebut. Oleh karena itu, kriteria pokok dalam evaluasi program adalah sejauh mana keberhasilan telah tercapai setelah pelaksanaan program. Tujuan evaluasi itu sendiri adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang akan membuktikan sampai di mana tingkat keberhasilan kebijakan program satu desa satu da'i dalam mencapai tujuan - tujuannya.

Evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk:

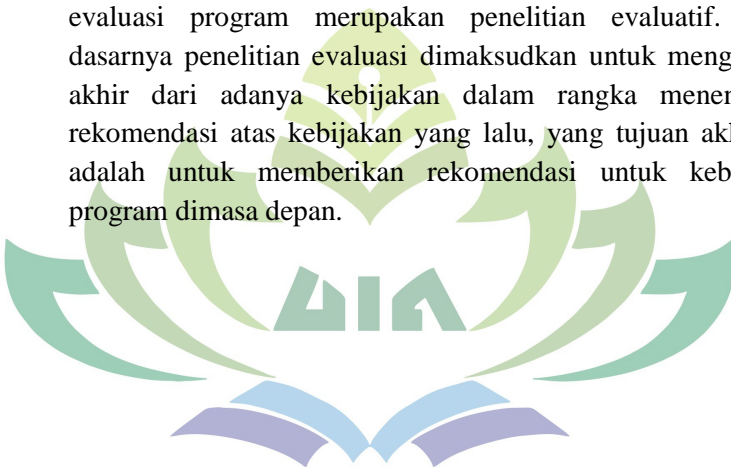
- a. Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama di tempat lain.
- b. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu dilanjutkan, diperbaiki atau diberhentikan. Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, maka evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian evaluasi. Oleh karena itu, dalam evaluasi program, pelaksana berfikir Dan menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian. Terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian evaluasi program adalah sebagai berikut:
 - 1) Dalam kegiatan penelitian, penulis ingin mengetahui gambaran tentang sesuatu kemudian hasilnya di deskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program

²⁸ *Ibid*, 42.

pelaksanaan ingin mengetahui seberapa tingkat keberhasilan hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul di bandingkan dengan kriteria atau standar tertentu.

- 2) Dalam kegiatan penelitian, penulis dituntut oleh rumusan masalah karena ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program dan apabila belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksanaan ingin mengetahui letak kekurangan itu dan apa sebabnya.²⁹

Dengan adanya uraian diatas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan penelitian evaluatif. Pada dasarnya penelitian evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang tujuan akhirnya adalah untuk memberikan rekomendasi untuk kebijakan program dimasa depan.



²⁹ Mulyatiningsih Endang, 114.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Akbar, Firyal dan Widya Kurniati Mohi, *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Ideas Publishing. Jakarta. 2018
- Anas Sudijono. *Pengantar Evaluasi Pendidikan* Rajawali P. Jakarta, 2009.
- Badrudin. *Dasar-Dasar Manajemen* ALFABETA. Bandung, 2015.
- Budi Winarni. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses* Media Pres. Yogyakarta, 2007.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya, 2010.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian* PT Bumi Ak. Semarang, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Gramedia P. Jakarta, 2008.
- Firyal Akbar & Widya Kurniati Mohi. *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan Di Indonesia)* Ideas Publ. Gorontalo, 2018.
- Heinz Wehrich and Haroid Koontz. *Manajemen A. Global Perspective Tent Edition* McGraw-Hil. New York, 1993.
- Hesel Nogi Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik* Lukman Off. Yogyakarta, 2003.
- Husein Kosasih. *Teknik Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Satuan Organisasi/Kerja Di Lingkungan Departemen Agama, Modul Diklat AKIP/LAKIP* Bafan Litb. Jakarta, 2004.
- Joko Widodo. *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia. jakarta, 2008.
- Kebudayaan, Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edited by Balai Pustaka. Jakarta, 1988.
- Lexi, J., and M M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif Rake Sarasin*. Remaja Ros. Bandung, 2010. available at <https://scholar.google.com/citations?user=O->

B3eJYAAAAJ&hl=en (2010).

- M. Sukardi. *Evaluasi Pendidikan* Edited by PT. Bumi Aksara. Jakarta, 2009.
- Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis* Bumi Aksar. Jakarta, 2006.
- Muhadjir Darwin. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, 1994.
- Muhadjir Darwin dan Wahyu N. *BPK: Pengantar Kebijakan Publik Tidak Dite*. 1997.
- Noeng H, Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kebijakan Dan Evaluasi Reseach* Edited by Rake Sarakin. Yogyakarta, 2003.
- Noeng Muhadjir. *Lmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif* Raka Saras. Yogyakarta, 2000.
- Riant Nugroho Dwidjowidjoto. *Public Polic* PT. Elex M. jakarta, 2008.
- Riant Nugroho Dwijowijoto. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi* PT. Elex M. jakarta, 2003.
- Rosadi Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* Rajawali Pers. Jakarta, 2017.
- Samodra Wibawa. *Evaluasi Kebijakan Publik* Edited by PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1994.
- Sondang P. Siagian. *Manajemen Strategic* PT. Bumi Aksara. Jakarta, 2004.
- Sugiono. *Metodology Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* Edited by Alfabeta. Bandung, 2008.
- *Metode Penelitian Manajemen* Alfabeta. Bandung, 2014.
- *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D CV* Alfabeta. Bandung, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi* (2nd ed.). Bandung, 2019.

- Suharmi Arikunto Dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. *Evaluasi Program Pendidikan Bumi Aksar*. Jakarta, 2010.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* PT Rineka. Jakarta, 2013
- Supriyanto, S dan Damayanti, A. *Perencanaan Dan Evaluasi* Airlangga. Surabaya, 2007.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research Jilid I* Andi Ofset. Yogyakarta, 1989.
- Wahab, Solichin Abdul. 'Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara'. Bumi Aksara. Jakarta, 2005.
- William N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, Gajah Mad. Yogyakarta, 2000.
- *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, Gajah Mad. Yogyakarta, 2003.
- Wirawan. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi Dan Profesi* Rajawali P. Jakarta, 2011.
- Jurnal**
- Alfarisi, Salma. "Da'wah Di Lingkungan Masyarakat Pedesaan; Study Implementasi Program Da'wah Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Di Desa Waisai Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat". *Bina Ummat*. Vol. 1 (2018).
- Hajaroh, Mami. 'POHON TEORI EVALUASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM (Metode, Nilai Dan Menilai, Penggunaan)'. *FONDASIA*. Vol. 9 no. 1 (2018).
- Isnawati ,Kuncari. 'Evaluasi Kebijakan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan (PSP-3) Di Kota Samarinda'. *Administrative Reform*. Vol. 7 (2019), p. 34.
- Nugroho , Agus Sulistiono. 'Efektifitas Program Da'i Siaga Bencana Lembaga Penanggulangan Bencana Dan Perubahan Iklim (LPBI) Nahdlatul Ulama'. (2017).

Yalia, Mulyono. 'Evaluasi Kebijakan Program Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)'. *Jurnal Penelitian Komunikasi*. Vol. 16 no. 2 (December 2013), p. 205–20. <https://doi.org/10.20422/jpk.v16i2.143>.

Sumber Lain

<https://lampung.bps.go.id/indikator/153/228/1/jumlah-desa-kelurahan.html> (12 Januari 2022)

<https://disdukcapil.lampungprov.go.id/detail-post/jumlah-penduduk-provinsi-lampung-semester-ii-tahun-2019> (16 maret 2022)

<https://databoks.katada.co.id/datapublish/2022/04/01/mayoritas-penduduk-lampung-beragama-islam#> (16 maret 2022)

